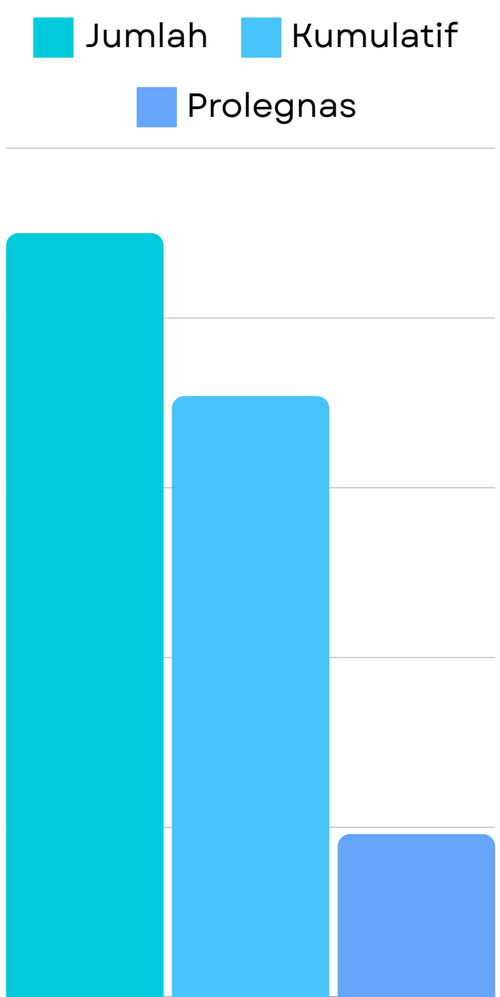
INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER

REALITAS LEGISLASI DI DPR

Lets Roll

Capaian Legislasi

Berdasarkan Prolegnas jangka menengah 2020-2024

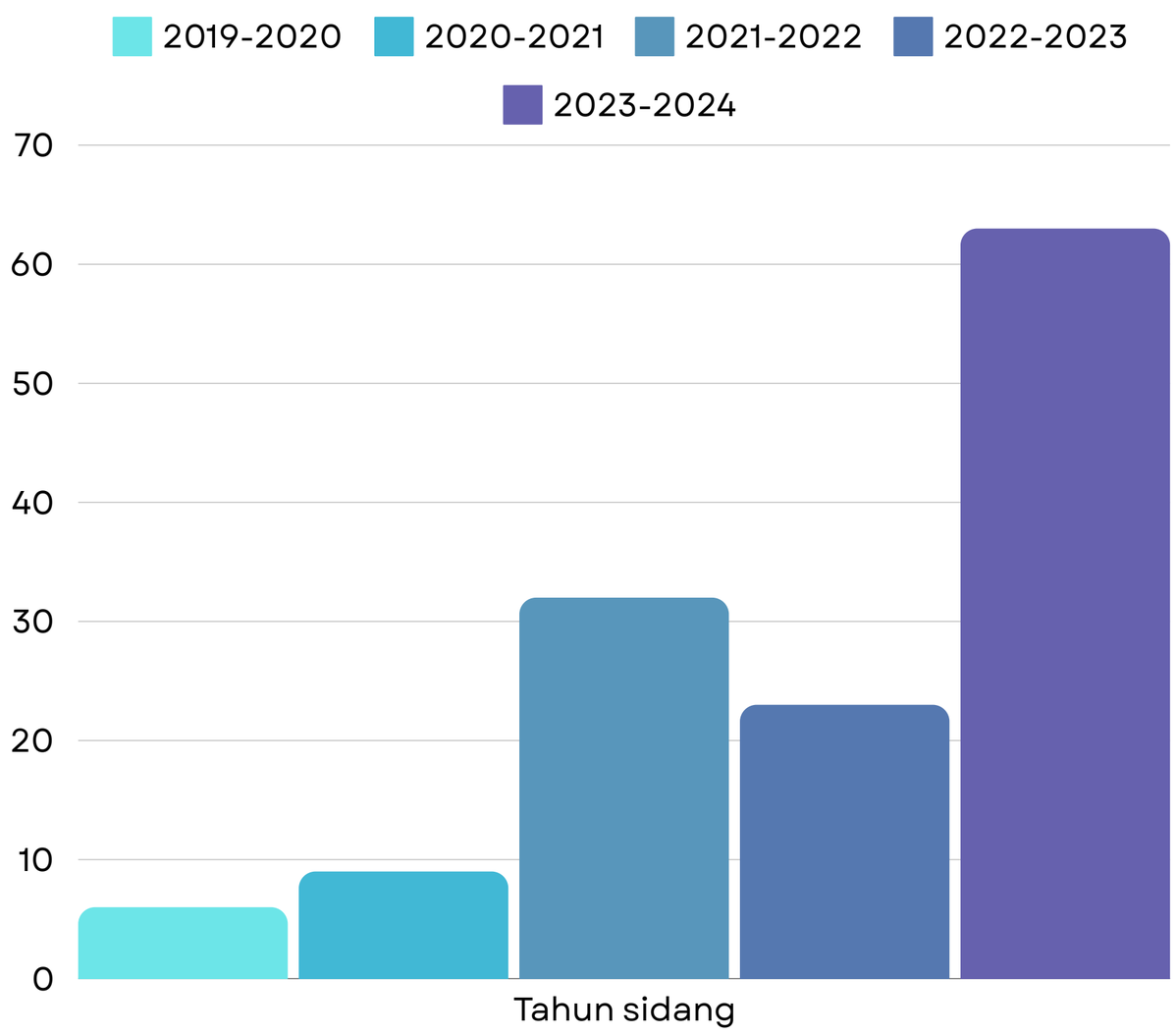


Secara kuantitas, sekilas produk legislasi DPR telah mencapai angka yang sangat signifikan. Namun, penyumbang terbanyak merupakan RUU Kumulatif terbuka yang sebagian besar adalah perubahan dasar hukum daerah.

Besarnya dominasi pengesahan RUU Kumulatif justru menunjukkan bahwa perencanaan prolegnas 2020-2024 tidak diimplementasikan dengan seksama.

sebab, proses pembentukan RUU dari jalur kumulatif terbuka merupakan fast track legislation.

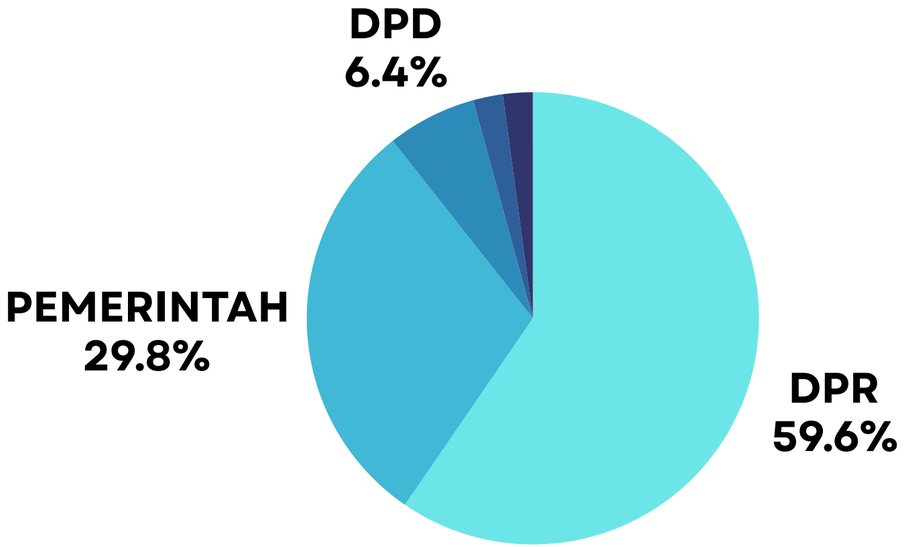
Berdasarkan Tahun Sidang



Berikut rincian UU yang diselesaikan setiap AKD DPR 2019-2024: **(126)**

Komisi I: 8 UU
Komisi II: 80 UU
Komisi III: 5 UU
Komisi IV: 1 UU
Komisi V: 1 UU
Komisi VI: 5 UU
Komisi VII: 1 UU
Komisi VIII: 1 UU
Komisi IX: 1 UU
Komisi X: 4 UU
Komisi XI: 5 UU
Badan Legislasi: 9 UU
Badan Anggaran: 1 UU
Panitia Khusus DPR RI: 4 UU

TAHUN SIDANG 2023-2024



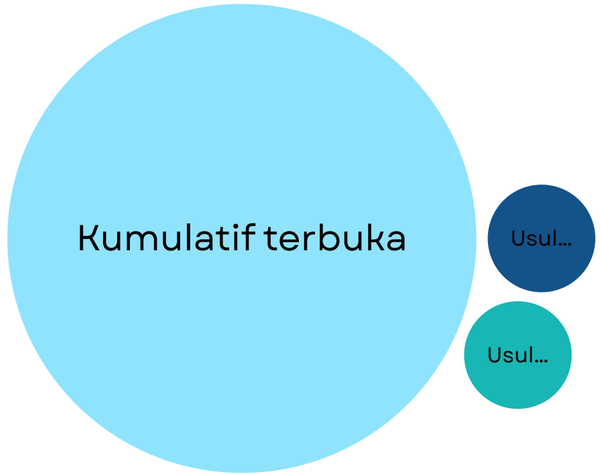
Total Prolegnas 2024: 47 RUU

- 51,06 % luncuran Prolegnas 2022;
- 13 RUU (27,66 %) luncuran Prolegnas 2023,
- 10 RUU (21,28 %) merupakan usulan baru

update 11 Juli 2024

63 RUU

disahkan menjadi Undang-undang



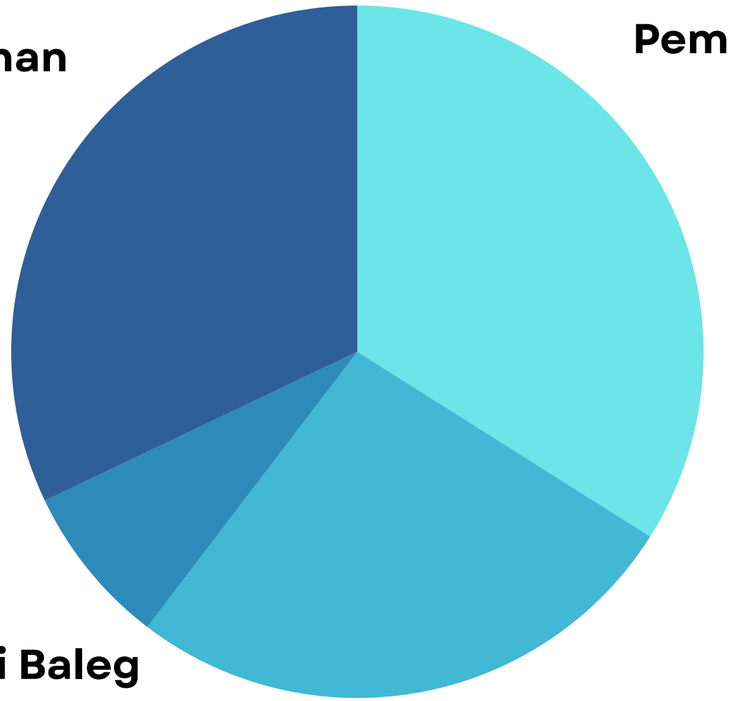
53 di RUU penyesuaian dasar hukum pembentukan kabupaten/kota

2 Anggaran, 1 Ratifikasi, 1 Revisi UU Desa

Belum termasuk: Wantimpres, Kementerian Negara, TNI, dan Keimigrasian.

Residu Legislasi

Berdasarkan tahapan legislasi prolegnas prioritas tahun 2024



RUU yang telah masuk tahap pembicaraan tingkat 1, antara lain:

- EBET
- NARKOTIKA
- HAP
- DAERAH KEPULAUAN
- 2 PJ INTER
- MK
- DESAIN INDUSTRI
- KELAUTAN
- PATEN,
- RPJM,
- PENGELOLAAN UDARA
- APBN
- OBAT DAN MAKANAN

RUU PPRT, BPIP, Perampasan Aset.

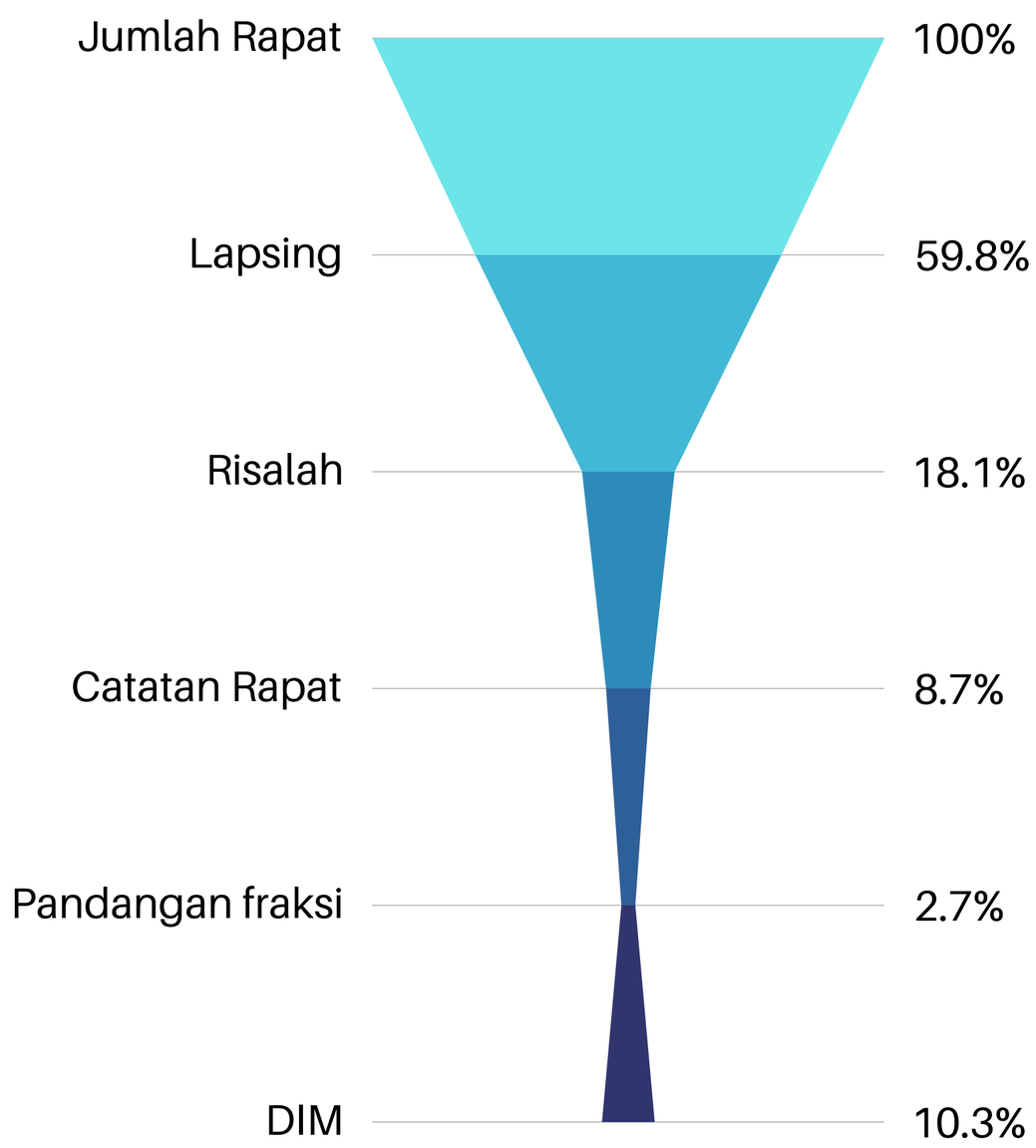
incase: pembahasan mandek karena belum ditindaklanjuti pimpinan DPR.

Transparansi Dokumen

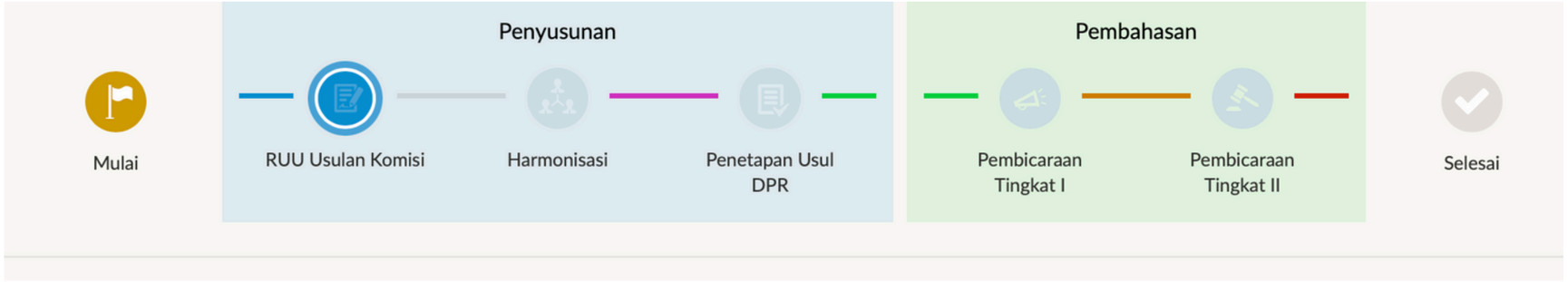
Berdasarkan 256 RUU prolegnas 2020-2024, hanya ditemukan 47 Naskah Akademik yang dipublish DPR RI.

IPC menemukan bahwa selama periode tersebut jumlah rapat yang dilaksanakan DPR sebanyak **952 rapat**

- Lapsing: 569
- Risalah: 172
- Catatan Rapat: 83
- Pandangan fraksi 26
- DIM: 98



TAHAPAN PENYUSUNAN LEGISLASI

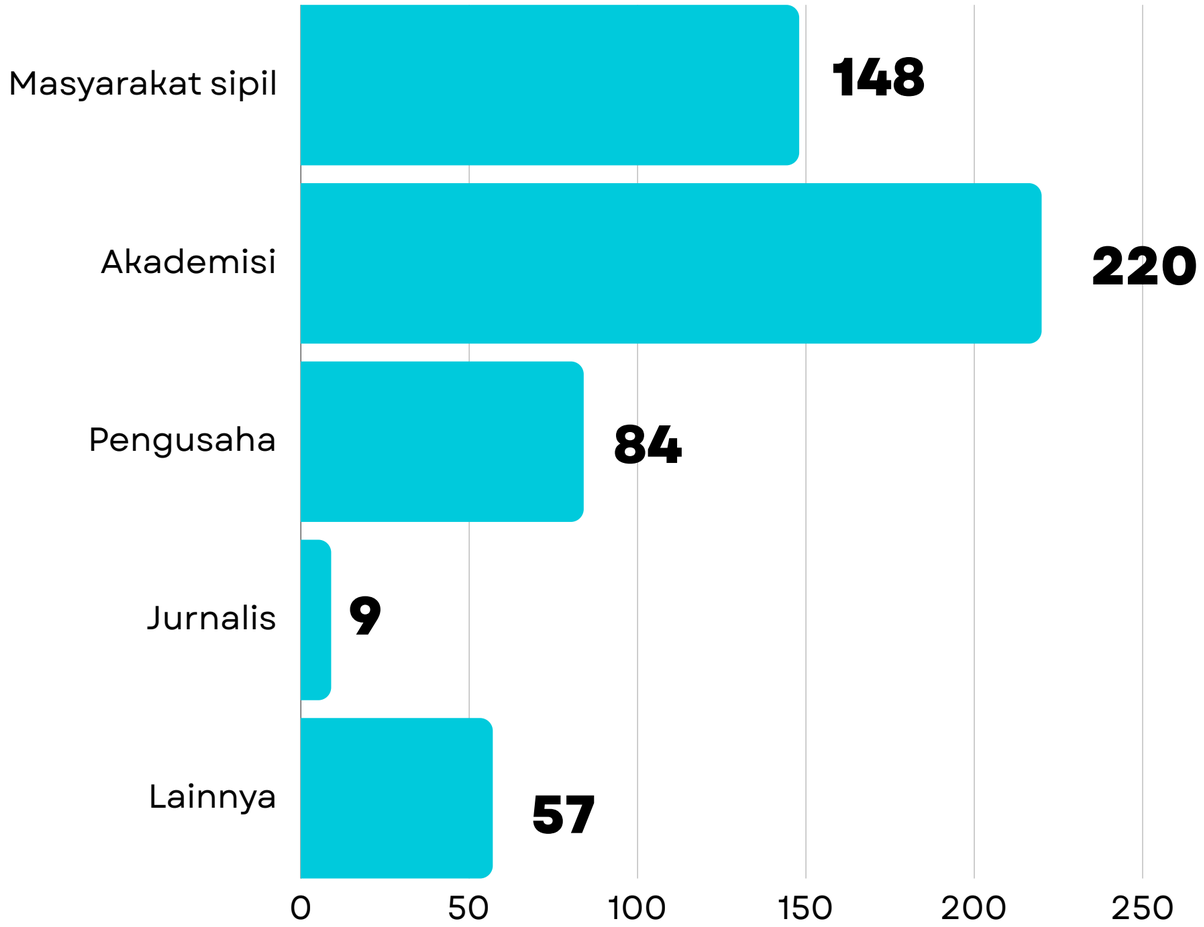


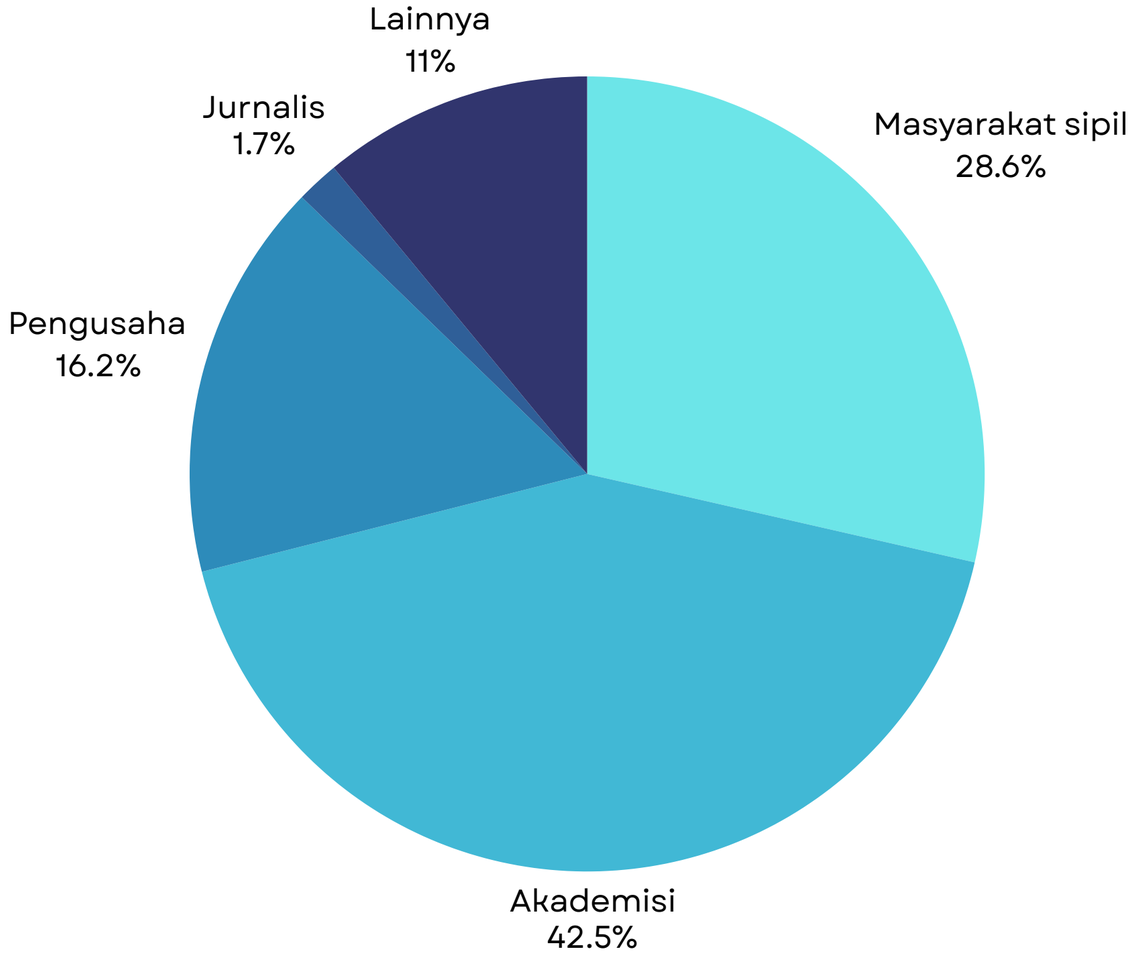


Setiap tahapan belum memiliki mekanisme partisipasi bermakna

- **Tahapan perencanaan**
- **Tahapan Penyusunan**
- **Tahapan Pembahasan**
- **Tahapan Perundang-undangan**

Partisipan Legislasi







Konsep & Teori

Robert A. Dahl (1971) dalam karyanya "Polyarchy: Participation and Opposition" membahas tentang konsep oposisi dalam sistem politik demokrasi.
Dahl menjelaskan bahwa keberadaan oposisi adalah **salah satu elemen kunci dari demokrasi yang seha**t karena memberikan ruang bagi **perbedaan pendapat dan kontrol** atas pemerintah yang berkuasa.

Oposisi

- Kooperatif
- Konstruktif
- Konfrontatif
- Radikal

Dinamika Perkembangan Oposisi di Parlemen

PAN
DEMOKRAT
PKS

DEMOKRAT
PKS

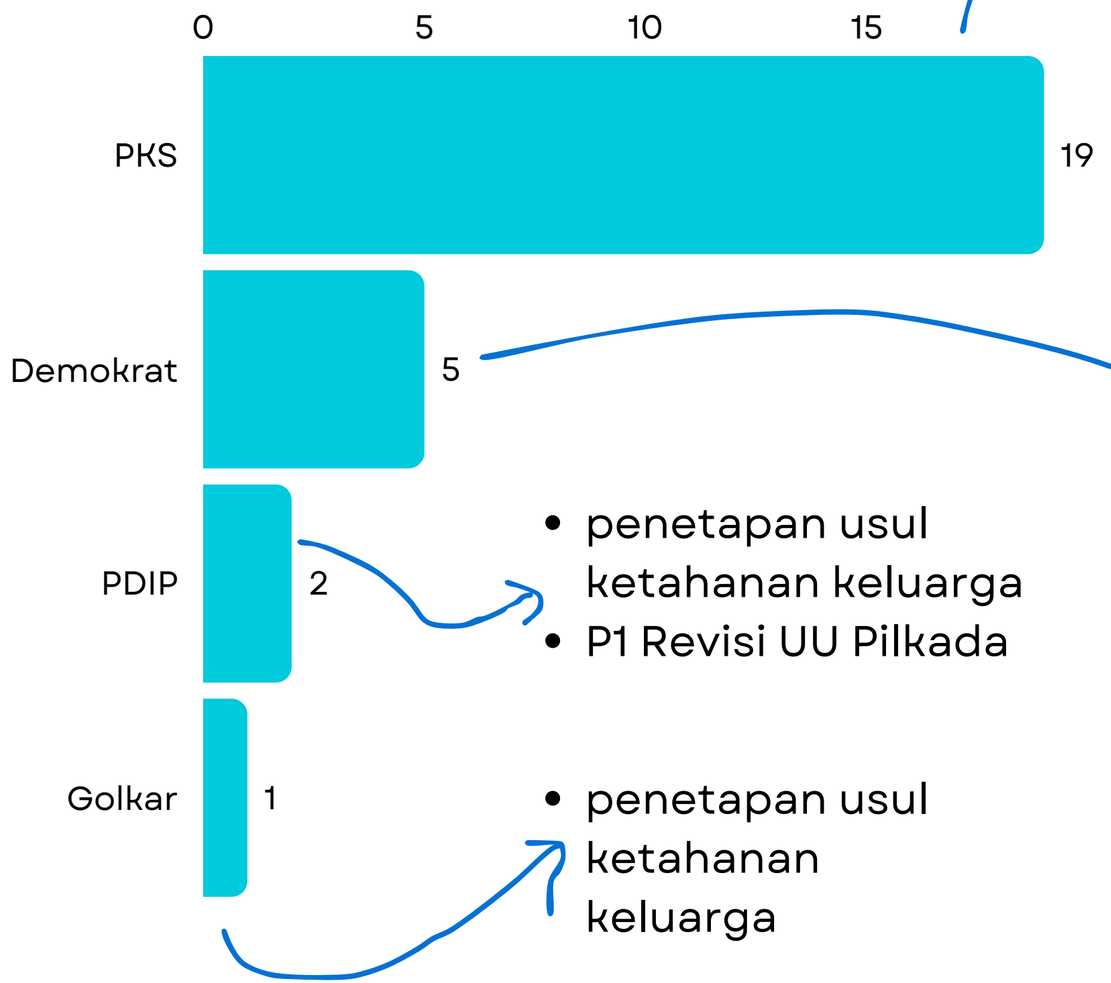
PKS

PDIP

Ternyata praktik oposis di parlemen cenderung dinamis, dapat dipengaruhi karena perkembangan politik, kepentingan partai, ideologi politik, dan perkembangan pemilu selanjutnya.

PANDANGAN FRAKSI

dalam konfigurasi oposisi/ penolakan dalam rapat pengambilan keputusan DPR.



- penetapan usul (Penyiaran, DKJ, Rev. UU Pilkada, Kesehatan, EBET)
- P1 (PPP, Keu. Pusat dan daerah, DKJ, kesehatan)
- P2 (PPP, IKN, Rev. IKN, DKJ, TPKS, Ciptaker, Perppu ciptaker, Perppu Covid, kesehatan)

- penetapan usul ketahanan keluarga
- P1 Revisi UU Pilkada

- penetapan usul (Penyiaran, Ketahanan keluarga)
- P2 (Minerba, Ciptaker, Perppu ciptaker)

- penetapan usul ketahanan keluarga

SIKAP FRAKSI

Secara umum, kategori sikap oposisi fraksi dapat digolongkan dalam beberapa kategori, seperti:

IDEOLOGIS

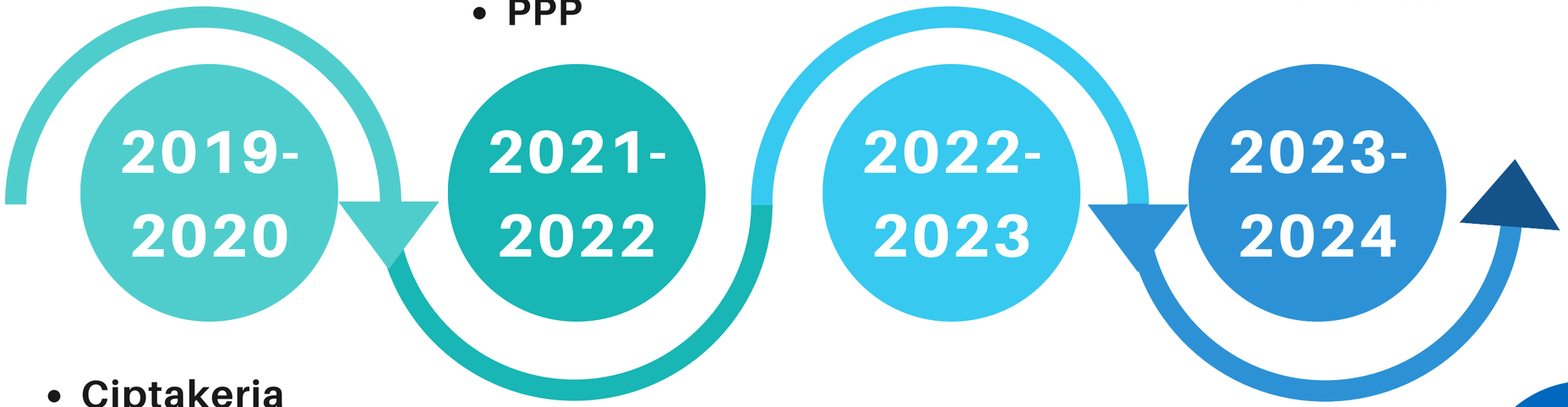
KEPENTINGAN PARTAI

PURA-PURA OPOSISI

- **Ketahanan Keluarga**
- **Revisi UU Pilkada**

OPOSISI LEGISLASI

Yang Telah melalui tahap Pembicaraan Tingkat II berdasarkan Tahun Sidang



- **Ciptakerja**
- **Minerba**
- Perppu Covid
- TPKS

- **IKN**
- Keu. Pusat dan daerah (HKPD)
- **PPP**

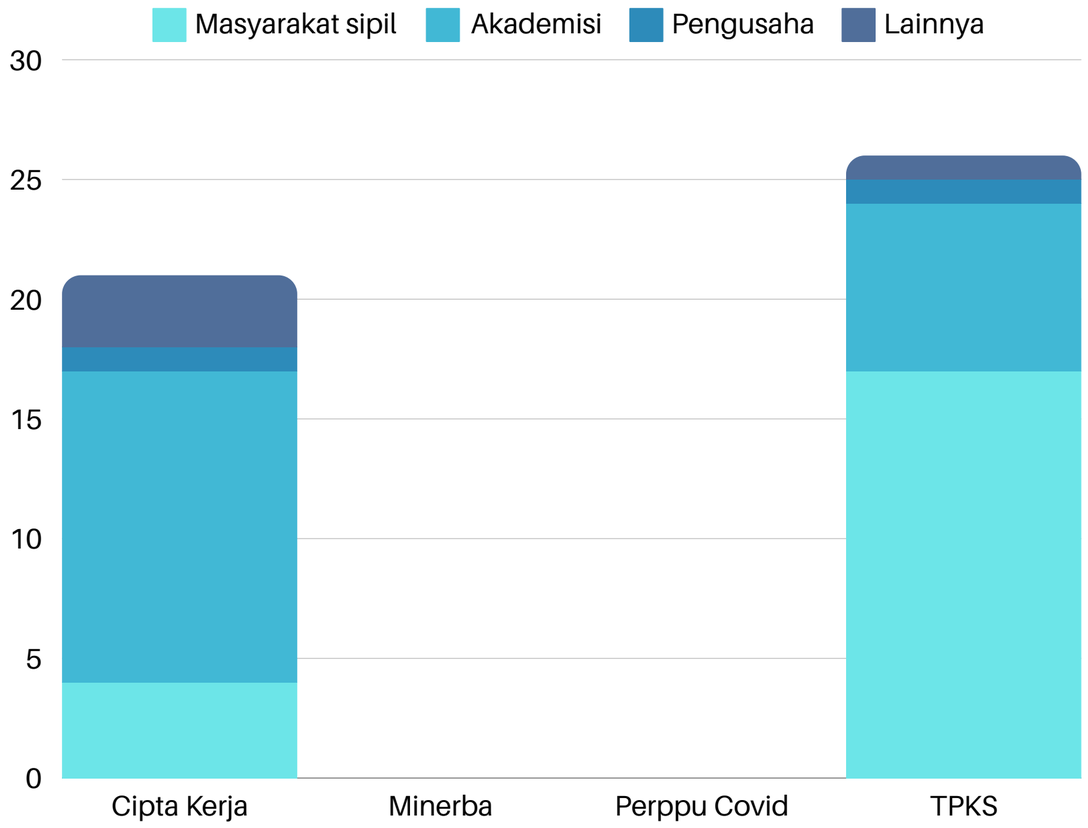
- **Perppu Ciptaker**
- Penyiaran

- Rev. IKN
- **DKJ**
- Kesehatan

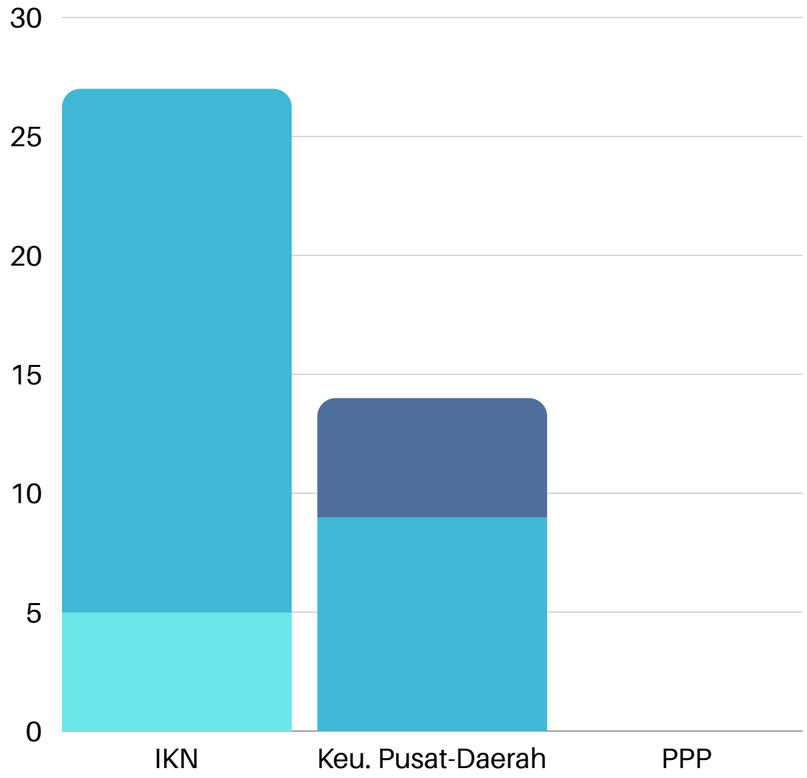
PETA PARTISIPASI

pada RUU yang “ditolak” oleh sejumlah fraksi dan telah disahkan menjadi UU.

2019-2020

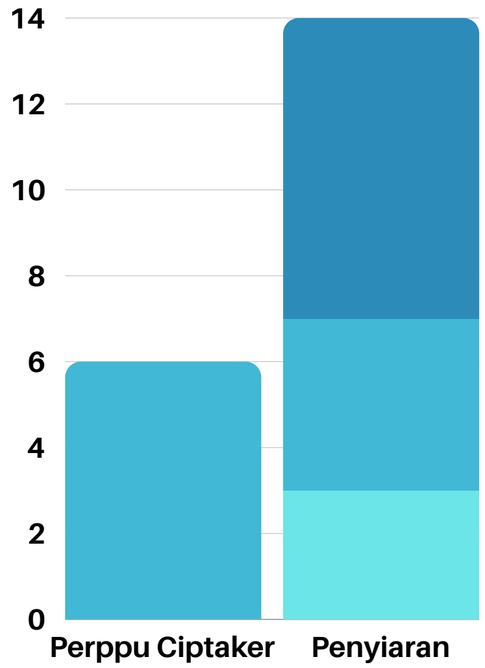


2021-2022

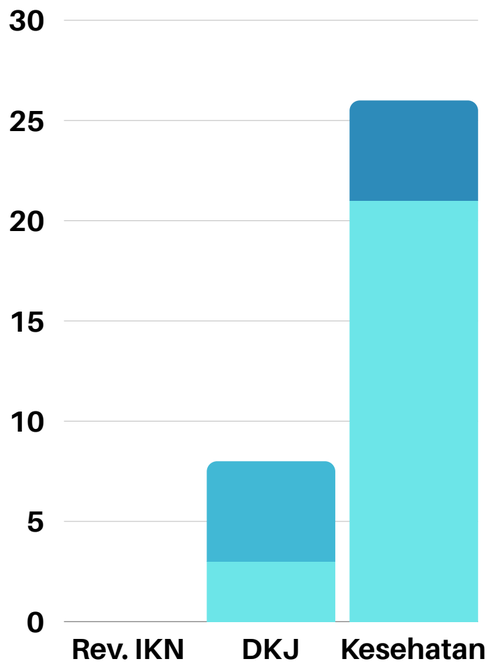


PETA PARTISIPASI

2022-2023



2023-2024

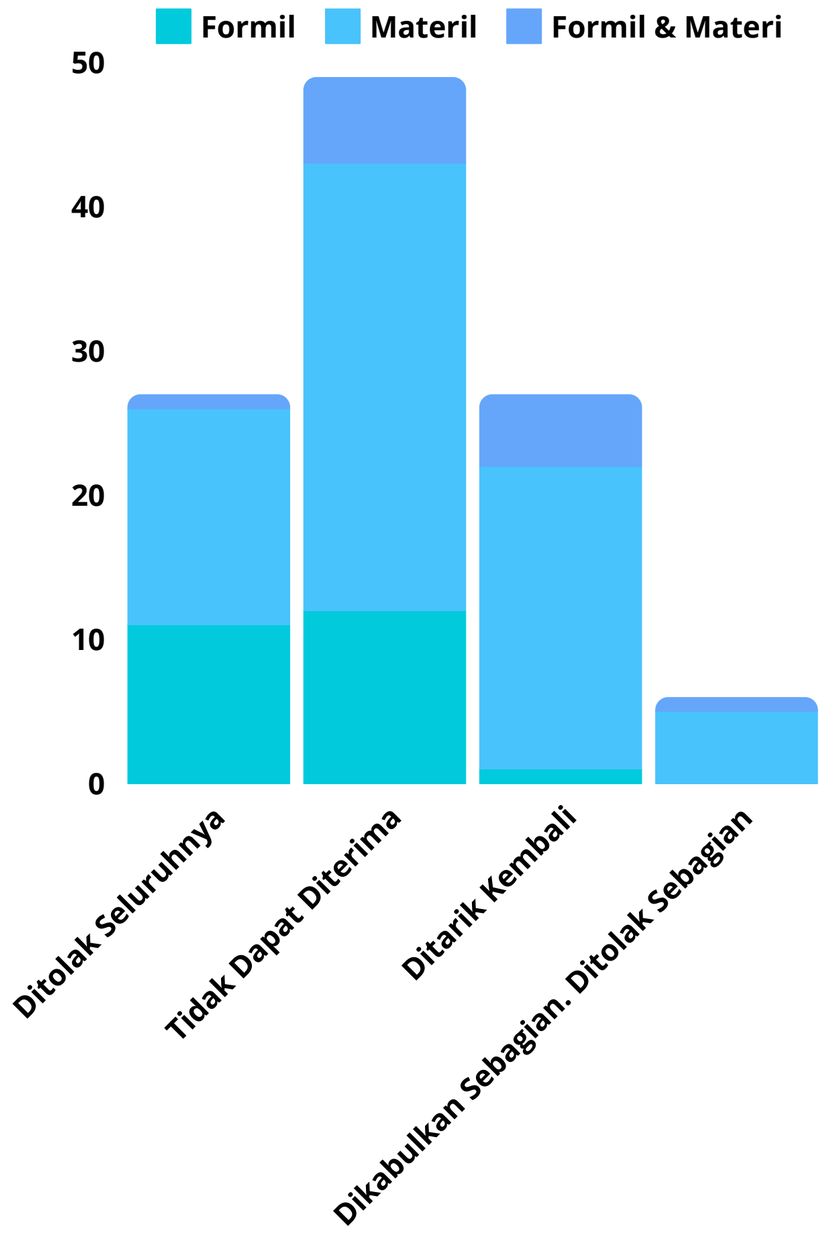


- Ternyata terdapat beberapa RUU yang mendapat perlawanan fraksi dalam pembicaraan tingkat II namun “nothing” partisipasi publik.
- Yaitu: Minerba, Perppu Covid, PPP, dan Rev. UU ikn.

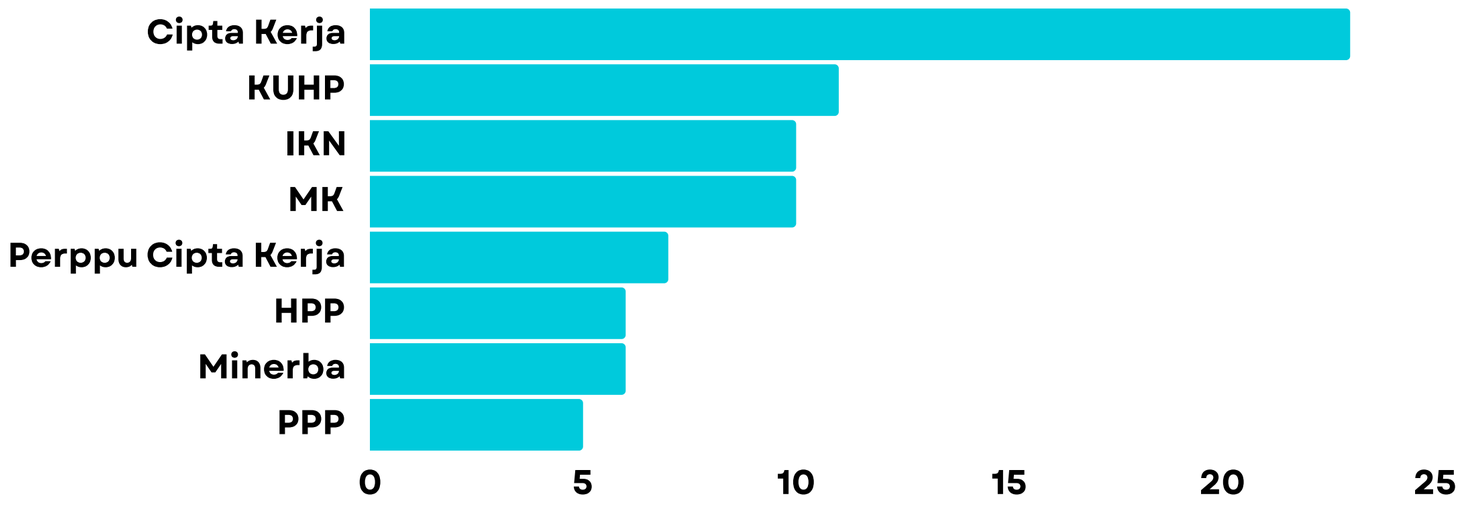
JUDICIAL REVIEW

- Terdapat **125 permohonan** Judicial Review terhadap UU yang disahkan dalam periode 2019-2020

NO	PERIHAL	JUMLAH
1	Jumlah Permohonan Uji Materiil	83
2	Jumlah Permohonan Uji Formil	25
3	Jumlah Permohonan Uji Materil beserta Uji Formil	17



- Apa saja UU yang paling banyak diajukan permohonan JUdicial Review ke MK?



- 4 JR: Otsus Papua, Perppu Cipta Kerja, Rev, UU Kejaksaan

“Silahkan Ajukan Judicial Review ke MK”

- Hak konstitusi untuk mengajukan JR ke MK seharusnya tidak dijadikan alasan singkat untuk menghindari pembahasan UU yang harus transparan, partisipatif, dan akuntabel.